

Proyeksi Kebutuhan dan Perkembangan Satuan Pendidikan di Kabupaten Sorong

Wa Ode Alma Syafira¹, La Ibal², Sulkipli³

^{1,2}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sorong, Kota Sorong

³Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sorong, Kota Sorong

e-mail: la.ibal1991@gmail.com, sulkipli0993@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis proyeksi kebutuhan dan perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Sorong pada jenjang SD, SMP, dan SMA dari tahun 2026 hingga 2046. Hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan jumlah satuan pendidikan di seluruh jenjang, meskipun pertumbuhan tidak merata di setiap distrik. Distrik Aimas dan Mariat mengalami peningkatan signifikan, sedangkan beberapa distrik seperti Klaso, Saengkeduk, dan Botain masih minim fasilitas pendidikan. Kondisi ini menggambarkan ketimpangan akses antara wilayah pusat dan pinggiran. Peningkatan jumlah sekolah di wilayah tertentu perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, sarana prasarana, serta pemerataan tenaga pendidik. Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sorong.

Kata kunci: Pendidikan, Infrastruktur, Kabupaten Sorong

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan (Rasyid et al., 2024). Melalui pendidikan, terutama pada jenjang menengah atas, individu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era revolusi industri 4.0 (Rahayu et al., 2023), (Sabaruddin, 2022). Di Kabupaten Sorong, peran pendidikan semakin strategis mengingat wilayah ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, keberadaan fasilitas pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA), menjadi kebutuhan fundamental dalam mencetak generasi muda yang kompeten, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Secara demografis, Kabupaten Sorong menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan dalam dua dekade mendatang. Berdasarkan data proyeksi, total penduduk diperkirakan naik dari sekitar 140.788 jiwa pada tahun 2026 menjadi lebih dari 180.000 jiwa pada tahun 2046. Peningkatan jumlah penduduk tersebut secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan di berbagai jenjang, termasuk SMA. Pertumbuhan penduduk usia sekolah menengah atas menuntut pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan lembaga pendidikan yang memadai, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun pemerataan antar-distrik (Setiawan et al., 2024). Tidak adanya perencanaan yang matang, ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pendidikan dapat memunculkan kesenjangan pendidikan yang berkelanjutan (Sagara et al., 2025), (Suryadinata et al., 2023).

Data proyeksi jumlah SMA di Kabupaten Sorong menunjukkan adanya peningkatan bertahap dari 29 unit pada tahun 2026 menjadi 38 unit pada tahun 2046. Meskipun angka ini menggambarkan arah perkembangan yang positif, penyebarannya masih belum merata di seluruh distrik. Distrik Aimas mendominasi dengan jumlah lembaga SMA terbanyak, yaitu dari 11 unit pada 2026 menjadi 16 unit pada 2046. Hal ini sejalan dengan posisi Aimas sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi kabupaten. Namun, di sisi lain, sebagian besar distrik seperti Klaso, Saengkeduk, Beraur, Bagun, dan Hobard belum memiliki fasilitas SMA sama sekali, menandakan masih adanya ketimpangan dalam akses pendidikan di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sorong masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki akses transportasi dan infrastruktur yang lebih baik. Distrik-distrik di daerah terpencil atau dengan kepadatan penduduk rendah masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan, tenaga pengajar, serta dukungan fasilitas pendukung lainnya. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada akses belajar, tetapi juga berpotensi memperlebar

jurang ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah (Anwar, 2022), (Efendi & Aini, 2025), (Hasanah, 2025). Padahal, pendidikan menengah atas berperan penting dalam menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja dengan keterampilan dasar yang memadai.

Selain faktor geografis, tantangan lain dalam pengembangan SMA di Kabupaten Sorong adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan pendidikan. Pendirian sekolah baru membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk pembangunan gedung, penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan sarana penunjang pembelajaran (Amalia, 2019). Di sisi lain, ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten di daerah-daerah terpencil masih menjadi persoalan klasik (Berliana et al., 2024), (Burhan et al., 2025). Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah (Zen et al., 2025).

Peningkatan jumlah SMA di Kabupaten Sorong juga perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Penambahan unit sekolah semata tidak akan memberikan dampak optimal tanpa disertai dengan peningkatan kualitas pengajaran, kurikulum yang relevan, serta dukungan teknologi pendidikan. Di era digital, sekolah-sekolah menengah atas harus mampu beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi, literasi digital, dan penguatan soft skills siswa (Adam et al., 2025), (Sugiarto et al., 2024). Oleh karena itu, selain memperluas akses, strategi peningkatan mutu menjadi komponen penting dalam pembangunan pendidikan di tingkat kabupaten.

Dari sisi perencanaan, data proyeksi jumlah SMA hingga tahun 2046 dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan sektor pendidikan. Perencanaan berbasis data memungkinkan penentuan lokasi sekolah baru yang lebih tepat sasaran, mempertimbangkan faktor demografi, jarak antarwilayah, serta pertumbuhan penduduk usia sekolah. Dengan pendekatan ini, kebijakan pembangunan pendidikan dapat lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar-distrik dan mendorong pemerataan akses pendidikan menengah atas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sorong.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah dan pemerataan fasilitas SMA di Kabupaten Sorong merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia daerah. Keberhasilan pembangunan pendidikan menengah atas tidak hanya akan meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, dukungan masyarakat, serta sinergi berbagai pihak, Kabupaten Sorong memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Metode

Metode penelitian proyeksi kebutuhan sekolah atau pendidikan untuk semua jenis sekolah disusun berdasarkan acuan teknis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (Perdana & Yola, 2025), (Adimagistra & Pigawati, 2016). Metode ini dirancang untuk menganalisis kebutuhan sarana pendidikan di masa mendatang dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk, standar pelayanan pendidikan, serta ketersediaan lahan dalam konteks penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Standar Kebutuhan Satuan pendidikan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)
1	TK	1250
2	SD	1600
3	SMP	4800
4	SMA	4800
5	Taman Bacaan	2500

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya dan SNI 03-1733-2004

Pengumpulan data demografi dan sosial yang mencakup jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta tingkat pendidikan. Data ini diperoleh dari BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Pendidikan. Analisis dilakukan menggunakan metode proyeksi penduduk, seperti metode geometrik, *least square* untuk memperoleh gambaran proyeksi jumlah penduduk usia sekolah dari tahun 2026 hingga 2046.

Mengidentifikasi jenis dan jenjang sekolah yang meliputi PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB. Data eksisting sekolah dikumpulkan untuk mengetahui jumlah, kapasitas, dan lokasi sekolah yang ada. Analisis spasial dilakukan untuk memetakan persebaran sekolah dan menilai kesenjangan antarwilayah. Hasilnya berupa peta distribusi fasilitas pendidikan yang menjadi dasar proyeksi kebutuhan.

3. Hasil dan Pembahasan

Data proyeksi jumlah penduduk di 30 distrik di Kabupaten Sorong menunjukkan tren peningkatan populasi secara konsisten dari tahun 2026 hingga 2046. Total jumlah penduduk diperkirakan naik dari 140.788 jiwa pada tahun 2026 menjadi 180.457 jiwa pada tahun 2046, atau meningkat sekitar 28%. Distrik Aimas menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi sepanjang periode tersebut, yakni dari 50.898 jiwa pada 2026 hingga mencapai 74.489 jiwa pada 2046, menunjukkan peran sentralnya sebagai pusat aktivitas dan pertumbuhan wilayah. Peningkatan signifikan juga terlihat di Mariat, Salawati, dan Mayamuk yang mengalami pertumbuhan stabil setiap lima tahun. Sementara itu, wilayah dengan pertumbuhan relatif kecil seperti Segun, Salawati Selatan, dan Salawati Tengah cenderung menunjukkan kenaikan yang lebih lambat, mencerminkan perbedaan tingkat perkembangan antarwilayah. Secara umum, tren ini menggambarkan dinamika demografis yang berpotensi memengaruhi perencanaan tata ruang, infrastruktur, dan kebutuhan layanan publik di Kabupaten Sorong dalam dua dekade mendatang.

Tabel 2. Proyeksi Penduduk Kabupaten Sorong Tahun 2026 – 2046

No.	Kampung /Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa/ha)				
		2026	2031	2036	2041	2046
1.	Klaso	1,264	1,315	1,366	1,417	1,468
2.	Saengkeduk	959	1,028	1,098	1,167	1,236
3.	Makbon	3,735	3,872	4,009	4,146	4,283
4.	Klayili	1,358	1,453	1,548	1,643	1,738
5.	Beraur	1,052	1,078	1,105	1,131	1,158
6.	Bagun	661	742	822	903	983
7.	Botain	426	452	478	504	531
8.	Klamono	6,824	7,044	7,264	7,484	7,704
9.	Klasafet	1,506	1,786	2,066	2,346	2,626
10.	Malabotom	1,264	1,370	1,477	1,583	1,690
11.	Klabot	928	1,032	1,136	1,240	1,344
12.	Buk	847	911	974	1,038	1,102
13.	Klawak	1,051	1,137	1,222	1,308	1,394
14.	Konhir	743	788	833	878	923
15.	Hobard	433	465	496	527	558
16.	Salawati	12,727	13,242	13,757	14,271	14,786
17.	Mayamuk	15,763	16,237	16,712	17,187	17,661
18.	Moisigin	4,026	4,290	4,553	4,816	5,080
19.	Seget	4,966	5,040	5,114	5,189	5,263
20.	Segun	1,822	1,841	1,859	1,878	1,896
21.	Salawati Selatan	1,474	1,487	1,501	1,515	1,529
22.	Salawati Tengah	1,897	1,914	1,932	1,949	1,966
23.	Aimas	50,898	56,796	62,693	68,591	74,489

No.	Kampung /Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa/ha)				
		2026	2031	2036	2041	2046
24.	Mariat	18,993	19,977	20,962	21,946	22,930
25.	Sorong	1,012	1,084	1,155	1,226	1,297
26.	Sayosa	1,521	1,629	1,736	1,844	1,951
27.	Wemak	971	1,055	1,140	1,224	1,308
28.	Sayosa Timur	592	678	765	852	938
29.	Maudus	637	725	813	900	988
30.	Sunook	541	595	649	702	756
Total		140,788	150,705	160,622	170,540	180,457

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data proyeksi jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 30 distrik di Kabupaten Sorong menunjukkan adanya peningkatan secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2046. Total PAUD diperkirakan meningkat dari 113 unit pada tahun 2026 menjadi 144 unit pada tahun 2046, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah. Distrik Aimas menempati posisi tertinggi dengan pertumbuhan signifikan dari 41 unit menjadi 60 unit, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan statusnya sebagai pusat kegiatan pendidikan dan ekonomi. Pertumbuhan juga terjadi di distrik Klamono, Mariat, Salawati, dan Moisigin, yang menunjukkan perhatian lebih terhadap penguatan layanan pendidikan dasar. Namun, beberapa distrik seperti Botain dan Hobard masih belum memiliki unit PAUD hingga 2046, menandakan perlunya pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan arah positif pengembangan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sorong, namun tetap diperlukan kebijakan strategis untuk mengatasi kesenjangan antar-distrik agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Tabel 3. Proyeksi Jumlah PAUD Kabupaten Sorong Tahun 2026 – 2046

No.	Kampung /Kelurahan	PAUD (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
1.	Klaso	1	1	1	1	1
2.	Saengkeduk	1	1	1	1	1
3.	Makbon	3	3	3	3	3
4.	Klayili	1	1	1	1	1
5.	Beraur	1	1	1	1	1
6.	Bagun	1	1	1	1	1
7.	Botain	0	0	0	0	0
8.	Klamono	5	6	6	6	6
9.	Klasafet	1	1	2	2	2
10.	Malabotom	1	1	1	1	1
11.	Klabot	1	1	1	1	1
12.	Buk	1	1	1	1	1
13.	Klawak	1	1	1	1	1
14.	Konhir	1	1	1	1	1
15.	Hobard	0	0	0	0	0
16.	Salawati	10	11	11	11	12
17.	Mayamuk	13	13	13	14	14
18.	Moisigin	3	3	4	4	4
19.	Seget	4	4	4	4	4
20.	Segun	1	1	1	2	2
21.	Salawati Selatan	1	1	1	1	1

No.	Kampung /Kelurahan	PAUD (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
22.	Salawati Tengah	2	2	2	2	2
23.	Aimas	41	45	50	55	60
24.	Mariat	15	16	17	18	18
25.	Sorong	1	1	1	1	1
26.	Sayosa	1	1	1	1	2
27.	Wemak	1	1	1	1	1
28.	Sayosa Timur	0	1	1	1	1
29.	Maudus	1	1	1	1	1
30.	Sunook	0	0	1	1	1
Total		113	121	128	136	144

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data proyeksi jumlah lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) di 30 distrik Kabupaten Sorong memperlihatkan tren peningkatan bertahap dari tahun 2026 hingga 2046. Secara keseluruhan, jumlah TK diperkirakan naik dari 56 unit pada tahun 2026 menjadi 72 unit pada tahun 2046. Distrik Aimas kembali menjadi wilayah dengan jumlah lembaga TK terbanyak, meningkat dari 20 unit menjadi 30 unit, mencerminkan konsentrasi pertumbuhan penduduk dan pusat layanan pendidikan di wilayah tersebut. Kenaikan juga terlihat pada distrik Mayamuk, Salawati, Mariat, dan Makbon yang menunjukkan perkembangan pendidikan usia dini yang cukup stabil. Sementara itu, beberapa distrik seperti Saengkeduk, Beraur, Bagun, Botain, Hobard, Sayosa Timur, Maudus, dan Sunook belum memiliki unit TK hingga tahun 2046, menggambarkan adanya kesenjangan dalam pemerataan fasilitas pendidikan dasar antarwilayah. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan lembaga TK di Kabupaten Sorong mengalami peningkatan, namun masih diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini di distrik-distrik terpencil dan berpenduduk sedikit.

Tabel 4. Proyeksi Jumlah TK Kabupaten Sorong Tahun 2026 – 2046

No.	Kampung /Kelurahan	TK (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
1.	Klaso	1	1	1	1	1
2.	Saengkeduk	0	0	0	0	0
3.	Makbon	1	2	2	2	2
4.	Klayili	1	1	1	1	1
5.	Beraur	0	0	0	0	0
6.	Bagun	0	0	0	0	0
7.	Botain	0	0	0	0	0
8.	Klamono	3	3	3	3	3
9.	Klasafet	1	1	1	1	1
10.	Malabotom	1	1	1	1	1
11.	Klabot	0	0	0	0	1
12.	Buk	0	0	0	0	0
13.	Klawak	0	0	0	1	1
14.	Konhir	0	0	0	0	0
15.	Hobard	0	0	0	0	0
16.	Salawati	5	5	6	6	6
17.	Mayamuk	6	6	7	7	7
18.	Moisigin	2	2	2	2	2
19.	Seget	2	2	2	2	2

No.	Kampung /Kelurahan	TK (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
20.	Segun	1	1	1	1	1
21.	Salawati Selatan	1	1	1	1	1
22.	Salawati Tengah	1	1	1	1	1
23.	Aimas	20	23	25	27	30
24.	Mariat	8	8	8	9	9
25.	Sorong	0	0	0	0	1
26.	Sayosa	1	1	1	1	1
27.	Wemak	0	0	0	0	1
28.	Sayosa Timur	0	0	0	0	0
29.	Maudus	0	0	0	0	0
30.	Sunook	0	0	0	0	0
Total		56	60	64	68	72

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data proyeksi jumlah Taman Bacaan di 30 distrik Kabupaten Sorong menunjukkan tren peningkatan bertahap dari tahun 2026 hingga 2046. Secara total, jumlah Taman Bacaan diperkirakan meningkat dari 56 unit pada tahun 2026 menjadi 72 unit pada tahun 2046. Distrik Aimas menjadi pusat utama pengembangan fasilitas literasi dengan peningkatan dari 20 unit menjadi 30 unit, sejalan dengan posisinya sebagai kawasan pendidikan dan administrasi yang paling maju. Pertumbuhan juga terlihat di distrik Mayamuk, Salawati, Mariat, dan Makbon, yang menunjukkan adanya kesadaran literasi dan dukungan terhadap akses bacaan masyarakat. Namun, beberapa distrik seperti Saengkeduk, Beraur, Bagun, Botain, Hobard, Sayosa Timur, Maudus, dan Sunook masih belum memiliki Taman Bacaan hingga tahun 2046, yang mengindikasikan kesenjangan dalam pemerataan sarana literasi antarwilayah. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah Taman Bacaan di Kabupaten Sorong mencerminkan komitmen terhadap penguatan budaya baca dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun pemerataan pembangunan di distrik-distrik terpencil masih perlu mendapat perhatian serius.

Tabel 5. Proyeksi Jumlah Taman Bacaan Kabupaten Sorong Tahun 2026 – 2046

No.	Kampung /Kelurahan	Taman Bacaan (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
1.	Klaso	1	1	1	1	1
2.	Saengkeduk	0	0	0	0	0
3.	Makbon	1	2	2	2	2
4.	Klayili	1	1	1	1	1
5.	Beraur	0	0	0	0	0
6.	Bagun	0	0	0	0	0
7.	Botain	0	0	0	0	0
8.	Klamono	3	3	3	3	3
9.	Klasafet	1	1	1	1	1
10.	Malabotom	1	1	1	1	1
11.	Klabot	0	0	0	0	1
12.	Buk	0	0	0	0	0
13.	Klawak	0	0	0	1	1
14.	Konhir	0	0	0	0	0
15.	Hobard	0	0	0	0	0
16.	Salawati	5	5	6	6	6
17.	Mayamuk	6	6	7	7	7
18.	Moisigin	2	2	2	2	2

No.	Kampung /Kelurahan	Taman Bacaan (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
19.	Seget	2	2	2	2	2
20.	Segun	1	1	1	1	1
21.	Salawati Selatan	1	1	1	1	1
22.	Salawati Tengah	1	1	1	1	1
23.	Aimas	20	23	25	27	30
24.	Mariat	8	8	8	9	9
25.	Sorong	0	0	0	0	1
26.	Sayosa	1	1	1	1	1
27.	Wemak	0	0	0	0	1
28.	Sayosa Timur	0	0	0	0	0
29.	Maudus	0	0	0	0	0
30.	Sunook	0	0	0	0	0
Total		56	60	64	68	72

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data proyeksi jumlah Sekolah Dasar (SD) di 30 distrik Kabupaten Sorong menunjukkan adanya peningkatan yang stabil dari tahun 2026 hingga 2046. Total jumlah SD diperkirakan naik dari 88 unit pada tahun 2026 menjadi 113 unit pada tahun 2046. Distrik Aimas mendominasi dengan peningkatan paling signifikan, yaitu dari 32 unit menjadi 47 unit, mencerminkan tingginya pertumbuhan penduduk dan peran Aimas sebagai pusat pendidikan dan aktivitas sosial ekonomi di wilayah kabupaten. Pertambahan juga terjadi di distrik Makbon, Klamono, Mariat, Salawati, dan Mayamuk, yang menunjukkan perkembangan infrastruktur pendidikan dasar secara konsisten. Sebaliknya, beberapa distrik seperti Botain, Hobard, dan Sunook masih belum memiliki unit SD hingga tahun 2046, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap pemerataan layanan pendidikan dasar di wilayah pedalaman dan berpenduduk jarang. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan arah positif dalam pembangunan sektor pendidikan dasar di Kabupaten Sorong, namun tetap diperlukan kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan agar semua anak di setiap distrik memperoleh akses belajar yang setara dan berkualitas.

Tabel 6. Proyeksi Jumlah Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Sorong Tahun 2026 – 2046

No.	Kampung /Kelurahan	SD (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
1.	Klaso	1	1	1	1	1
2.	Saengkeduk	1	1	1	1	1
3.	Makbon	2	2	3	3	3
4.	Klayili	1	1	1	1	1
5.	Beraur	1	1	1	1	1
6.	Bagun	0	0	1	1	1
7.	Botain	0	0	0	0	0
8.	Klamono	4	4	5	5	5
9.	Klasafet	1	1	1	1	2
10.	Malabotom	1	1	1	1	1
11.	Klabot	1	1	1	1	1
12.	Buk	1	1	1	1	1
13.	Klawak	1	1	1	1	1
14.	Konhir	0	0	1	1	1
15.	Hobard	0	0	0	0	0
16.	Salawati	8	8	9	9	9

No.	Kampung /Kelurahan	SD (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
17.	Mayamuk	10	10	10	11	11
18.	Moisigin	3	3	3	3	3
19.	Seget	3	3	3	3	3
20.	Segun	1	1	1	1	1
21.	Salawati Selatan	1	1	1	1	1
22.	Salawati Tengah	1	1	1	1	1
23.	Aimas	32	35	39	43	47
24.	Mariat	12	12	13	14	14
25.	Sorong	1	1	1	1	1
26.	Sayosa	1	1	1	1	1
27.	Wemak	1	1	1	1	1
28.	Sayosa Timur	0	0	0	1	1
29.	Maudus	0	0	1	1	1
30.	Sunook	0	0	0	0	0
Total		88	94	100	107	113

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data proyeksi jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 30 distrik Kabupaten Sorong menunjukkan peningkatan yang relatif lambat namun stabil dari tahun 2026 hingga 2046. Total jumlah SMP diperkirakan bertambah dari 29 unit pada tahun 2026 menjadi 38 unit pada tahun 2046. Distrik Aimas kembali menjadi pusat pendidikan menengah dengan peningkatan terbesar, dari 11 unit menjadi 16 unit, menggambarkan konsentrasi populasi dan fasilitas pendidikan yang kuat di wilayah tersebut. Pertumbuhan juga terlihat di distrik Klamono, Mariat, Mayamuk, dan Salawati, yang menunjukkan adanya perluasan akses pendidikan menengah di wilayah strategis. Namun, sebagian besar distrik lainnya seperti Klaso, Saengkeduk, Beraur, Hobard, dan Sayosa Timur belum memiliki unit SMP hingga tahun 2046, menandakan kesenjangan yang cukup besar dalam penyediaan fasilitas pendidikan tingkat menengah. Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan arah pembangunan pendidikan yang positif, tetapi juga menegaskan perlunya strategi pemerataan pembangunan sekolah menengah di distrik-distrik terpencil agar kesempatan pendidikan bagi remaja di Kabupaten Sorong dapat lebih merata dan berkeadilan.

Tabel 7. Proyeksi Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Sorong Tahun 2026 – 2046

No.	Kampung /Kelurahan	SMP (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
1.	Klaso	0	0	0	0	0
2.	Saengkeduk	0	0	0	0	0
3.	Makbon	1	1	1	1	1
4.	Klayili	0	0	0	0	0
5.	Beraur	0	0	0	0	0
6.	Bagun	0	0	0	0	0
7.	Botain	0	0	0	0	0
8.	Klamono	1	1	2	2	2
9.	Klasafet	0	0	0	0	1
10.	Malabotom	0	0	0	0	0
11.	Klabot	0	0	0	0	0
12.	Buk	0	0	0	0	0
13.	Klawak	0	0	0	0	0
14.	Konhir	0	0	0	0	0

No.	Kampung /Kelurahan	SMP (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
15.	Hobard	0	0	0	0	0
16.	Salawati	3	3	3	3	3
17.	Mayamuk	3	3	3	4	4
18.	Moisigin	1	1	1	1	1
19.	Seget	1	1	1	1	1
20.	Segun	0	0	0	0	0
21.	Salawati Selatan	0	0	0	0	0
22.	Salawati Tengah	0	0	0	0	0
23.	Aimas	11	12	13	14	16
24.	Mariat	4	4	4	5	5
25.	Sorong	0	0	0	0	0
26.	Sayosa	0	0	0	0	0
27.	Wemak	0	0	0	0	0
28.	Sayosa Timur	0	0	0	0	0
29.	Maudus	0	0	0	0	0
30.	Sunook	0	0	0	0	0
Total		29	31	33	36	38

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data proyeksi jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) di 30 distrik Kabupaten Sorong menunjukkan tren peningkatan bertahap dari tahun 2026 hingga 2046. Total jumlah SMA diperkirakan naik dari 29 unit pada tahun 2026 menjadi 38 unit pada tahun 2046. Distrik Aimas menjadi pusat pendidikan menengah atas dengan peningkatan terbesar, dari 11 unit menjadi 16 unit, mencerminkan peran pentingnya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di wilayah kabupaten. Pertumbuhan juga terjadi di distrik Mayamuk, Klamono, Mariat, dan Salawati, yang menunjukkan adanya perluasan akses pendidikan ke tingkat lanjutan di beberapa wilayah strategis. Namun, sebagian besar distrik lainnya seperti Klaso, Saengkeduk, Beraur, Bagun, Botain, dan Hobard masih belum memiliki fasilitas SMA hingga tahun 2046, menandakan adanya ketimpangan dalam pemerataan pendidikan menengah atas. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan arah positif dalam peningkatan jumlah fasilitas pendidikan tingkat lanjut di Kabupaten Sorong, namun tetap diperlukan kebijakan pemerataan yang berkelanjutan agar setiap distrik memiliki akses yang setara terhadap pendidikan menengah atas sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Tabel 8. Proyeksi Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Sorong Tahun 2026 – 2046

No.	Kampung /Kelurahan	SMA (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
1.	Klaso	0	0	0	0	0
2.	Saengkeduk	0	0	0	0	0
3.	Makbon	1	1	1	1	1
4.	Klayili	0	0	0	0	0
5.	Beraur	0	0	0	0	0
6.	Bagun	0	0	0	0	0
7.	Botain	0	0	0	0	0
8.	Klamono	1	1	2	2	2
9.	Klasafet	0	0	0	0	1
10.	Malabotom	0	0	0	0	0
11.	Klabot	0	0	0	0	0
12.	Buk	0	0	0	0	0

No.	Kampung /Kelurahan	SMA (Unit)				
		2026	2031	2036	2041	2046
13.	Klawak	0	0	0	0	0
14.	Konhir	0	0	0	0	0
15.	Hobard	0	0	0	0	0
16.	Salawati	3	3	3	3	3
17.	Mayamuk	3	3	3	4	4
18.	Moisigin	1	1	1	1	1
19.	Seget	1	1	1	1	1
20.	Segun	0	0	0	0	0
21.	Salawati Selatan	0	0	0	0	0
22.	Salawati Tengah	0	0	0	0	0
23.	Aimas	11	12	13	14	16
24.	Mariat	4	4	4	5	5
25.	Sorong	0	0	0	0	0
26.	Sayosa	0	0	0	0	0
27.	Wemak	0	0	0	0	0
28.	Sayosa Timur	0	0	0	0	0
29.	Maudus	0	0	0	0	0
30.	Sunook	0	0	0	0	0
Total		29	31	33	36	38

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4. Simpulan dan Saran

Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap proyeksi jumlah sekolah di Kabupaten Sorong yang mencakup seluruh jenjang pendidikan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah satuan pendidikan dari tahun 2026 hingga 2046. Namun, peningkatan tersebut masih belum merata di seluruh distrik. Distrik Aimas dan Mariat terus menjadi pusat pertumbuhan fasilitas pendidikan dengan jumlah sekolah yang meningkat secara signifikan, sedangkan sebagian besar distrik lain, terutama yang berada di wilayah pedalaman seperti Klaso, Saengkeduk, Beraur, dan Bagun, belum menunjukkan perkembangan berarti. Ketimpangan ini menandakan bahwa akses terhadap pendidikan formal masih terkonsentrasi di wilayah yang lebih mudah dijangkau. Selain itu, meskipun secara kuantitatif terjadi pertumbuhan, kualitas pendidikan masih perlu diperhatikan, terutama dalam hal ketersediaan guru, sarana prasarana, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Sorong adalah bagaimana mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Pemerintah Kabupaten Sorong perlu mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan mutu di semua jenjang sekolah. Distrik-distrik yang belum memiliki satuan pendidikan dasar dan menengah harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan sekolah baru. Di sisi lain, untuk distrik yang telah memiliki fasilitas memadai, fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, peningkatan fasilitas belajar, dan penerapan teknologi pendidikan.

Daftar Pustaka

- Adam, M. W. S., Tukloy, A. W., Julistiana, R., & Munu, I. (2025). Pendekatan Pembelajaran untuk Meningkatkan Literasi Digital Siswa. *GURUKU: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(3), 14–19.
- Adimagistra, T., & Pigawati, B. (2016). Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 58–66. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.58-66>
- Amalia, S. Z. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prambon Nganjuk. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1), 17–24. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p17-24>
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Berliana, N., Indah, N., Hamidah, F., & Jasmi, R. A. (2024). Tantangan Dan Solusi Pendidikan Di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Desa Cisampang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1–23.
- Burhan, Busnawir, & Pugu, M. R. (2025). Kebijakan Pemerataan Guru dan Kualitas Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(01), 253–263.
- Efendi, M., & Aini, N. (2025). Ketimpangan Sosial Ekonomi dan Akses Pendidikan: Studi Kasus Masyarakat Marginal. *Integrating Religion, Social Economy, and Law: Conference Series*, 1(2), 127–131. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ics>
- Hasanah, R. (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Isu Ham dan Kebijakan Hukum di Indonesia. *Wicarana*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.97>
- Perdana, K. A., & Yola, L. (2025). Analisis Kesesuaian Pembangunan Kawasan Danau Bogor Raya dengan Aturan Teknis SNI 03-1733-2004 dan Teori Good City Form. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1933–1944. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7678>
- Rahayu, F., Arkam, R., & Mustikasari, R. (2023). Strategi Pengembangan Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia Dini Dengan Pembudayaan Antri. *MENTARI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 1–5. <https://doi.org/10.60155/mentari.v3i2.367>
- Rasyid, A. R., Alfareza, A. M. S., & M, M. A. (2024). Peran Pendidikan Dalam Pembangunan Manusia dan Berkelanjutan Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(3), 2118–2302.
- Sabaruddin, S. (2022). Pendidikan Indonesia Menghadapi Era 4.0. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 10(1), 43–49. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v10i1.29347>
- Sagara, R., Setiawan, A. H., Almuzafir, & Purnawan, E. (2025). Dinamika Kependudukan dan Ketenagakerjaan: Tantangan dan Kebijakan Berkelanjutan untuk Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 317–329. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3629>
- Setiawan, E., Handayani, N., Setiyono, R., Hermansyah, Ahmad, & Widyatmike. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 29–38.
- Sugiarto, S., Martono, M., & Priyadi, A. T. (2024). Integrasi Teknologi Dan Literasi Digital Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa di Sekolah. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 1(1), 2100–2112. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3069>
- Suryadinata, D. M., Bahtiar, N. S., Hidayah, A. N., & Sholihah, A. (2023). Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesenjangan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains*, 02(02), 159–170.

Zen, N. H., Mageiasti, L., & Yulhendri. (2025). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Penerapan SDGs Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia : Tinjauan Literatur dan Tantangan Implementasi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 775–785.